

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya patriarki terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara pada periode 2024. Berdasarkan analisis data kuesioner dari 100 responden di 8 kabupaten di Sumatera Utara, penelitian menemukan bahwa budaya patriarki menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap rendahnya keterwakilan perempuan. Mayoritas responden yang memilih calon legislatif laki-laki (38,5%) beralasan bahwa laki-laki lebih layak untuk memimpin daripada perempuan, dan 31% setuju bahwa laki-laki adalah pemimpin dominan dalam masyarakat. Hal ini mengindikasikan pengaruh kuat budaya patriarki dalam preferensi pemilih. Selain itu, 34,6% responden menyatakan kurangnya pengetahuan tentang calon legislatif perempuan, dan 16,7% merasa calon legislatif laki-laki lebih dikenal, menunjukkan bahwa kurangnya popularitas menjadi hambatan. Lebih lanjut, 42,3% responden berpendapat partai politik tidak memberikan dukungan yang memadai terhadap calon legislatif perempuan, dan 23,1% dipengaruhi oleh dominasi laki-laki dalam kepemimpinan partai, mengindikasikan pemberdayaan yang belum optimal. Dengan demikian, penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian dengan mengidentifikasi budaya patriarki sebagai faktor utama penyebab minimnya keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Gender

Sebagai saran, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Daerah mengadakan program sosialisasi dan edukasi tentang kesetaraan gender yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk tokoh adat, agama, dan pemuda. Selain itu, lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan materi tentang kesetaraan gender ke dalam kurikulum pendidikan formal sejak dini untuk mengubah pola pikir dan norma sosial yang bias gender, sehingga tercipta kesadaran yang lebih inklusif dan mendukung partisipasi perempuan dalam politik.

2. Penguatan Peran Partai Politik

Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, penelitian ini merekomendasikan agar partai politik memberikan dukungan yang lebih besar kepada calon legislatif perempuan, termasuk melalui pelatihan kepemimpinan, peningkatan kapasitas politik, dan alokasi sumber daya yang adil. Di sisi lain, KPU perlu secara ketat mengawasi dan mengevaluasi implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif, serta memberikan sanksi tegas bagi partai politik yang tidak mematuhi aturan tersebut. Langkah-langkah

ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih suportif dan mendorong partisipasi perempuan dalam proses politik.

3. Penelitian Lanjutan

Penelitian ini merekomendasikan agar riset mendatang dilakukan dengan metode yang lebih mendalam, misalnya melalui wawancara dengan pemilih, calon legislatif, dan pengurus partai politik, untuk memahami dinamika keterwakilan perempuan dalam politik secara lebih komprehensif. Selain itu, penting untuk memfokuskan penelitian pada analisis kebijakan yang mendukung perempuan dan efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan di Sumatera Utara.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini secara komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat meningkat secara signifikan, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat.